Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 24 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 1 DAN 11 / 1-2 DAN 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 371.27 / EVALUASI BELAJAR - EBTANAS

Pelaksanaan Ebtanas 2001 Distandarkan

Jakarta, Kompas

Mulai tahun 2001 pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) dilakukan dengan standar sama untuk seluruh Indonesia. Standardisasi yang akan dilakukan itu meliputi pengadaan kisi-kisi soal, pembuatan soal sampai pemeriksaan, sistem pengamanan soal, serta pelaksanaan ujian hingga mekanisme penyaluran uang dan pertanggungjawabannya.

Dalam kaitan itu, Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja, serta Menteri Agama Tholchah Hasan sepakat menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang penyelenggaraan ebta dan ebtanas tahun ajaran 2000/2001. Isi SKB tertanggal 21 Maret lalu itu antara lain menyetujui adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur persoalan teknis dalam penyelenggaraan ebtanas tersebut.

Demikian keterangan yang diperoleh *Kompas* dari "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Ebtanas" di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas, Jakarta, Jumat (23/3). Sehari sebelumnya, di hadapan peserta rapat, Yahya menegaskan kembali bahwa tahun ini pelaksanaan ebtanas untuk siswa SD dan SLTP—baik negeri maupun swasta—harus benar-benar gratis. Untuk itu, pemerintah pusat sudah menyediakan dana sekitar Rp 160 milyar guna membiayai 6.917.891 peserta ebtanas SD dan SLTP.

Pelaksanaan ebtanas itu sendiri sebetulnya hingga kini masih banyak dikritik. Pembiayaan ebtanas yang begitu besar dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Ebtanas yang dikeluarkan tahun 1992 dan diperbarui tahun 1997, disebutkan bahwa salah satu tujuan ebtanas adalah untuk memperoleh informasi tentang mutu hasil pendidikan secara nasional. Ebtanas juga dimaksudkan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, memperoleh gambaran perbandingan mutu pendidikan antarsekolah dan antarwilayah, serta mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan program dan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, ebtanas memang sudah berhasil memberikan gambaran tentang mutu pendidikan secara umum beserta perbandingannya antarsekolah dan antarwilayah. Hal itu terlihat dari nilai ebtanas murni (NEM) yang dihasilkan, di mana variasi pencapaian hasil NEM antarwilayah menunjukkan ketimpangan. Akan tetapi, fungsinya sebagai umpan balik untuk penyempurnaan atau peningkatan mutu pembelajaran tak pernah dioperasionalkan. Belum lagi menyangkut ekses negatif di mana pihak sekolah akhirnya berlomba-lomba men-*drill* siswa agar hafal soal-soal dan jawaban yang mungkin akan diebtanaskan sehingga mengabaikan aspek penting pendidikan sebagai proses pembelajaran.

Pertama kali

Di tengah berbagai kritikan itu, tahun ini format pelaksanaan ebtanas sedikit diperbaiki. Selain membebaskan siswa dari pembiayaan ebtanas, pemerintah juga menerapkan suatu sistem yang mereka namakan SOP.

Standardisasi prosedur yang baru pertama kali diterapkan ini mengatur tentang peserta ebtanas, organisasi penyelenggaraan ebtanas, prosedur penyiapan bahan ujian, pemilihan paket soal SD/madrasah ibtidaiyah (MI)/SD Luar Biasa/SLTP/madrasah tsanawiyah (MTs), dan SMU/madrasah aliyah (MA)/sekolah menengah kejuruan (SMK). Standardisasi itu juga mencakup pencetakan/penggandaan naskah tes, pengiriman naskah tes, penyimpanan naskah tes, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, pencetakan daftar kolom nilai ebtanas murni (NEM), daftar NEM, dan STTB. Begitu juga dengan penentuan tamat belajar, mekanisme prosedur pengawasan serta pengamanan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ebtanas, hingga penyusunan laporan hasil ebtanas.

Dalam beberapa kali kesempatan, Yahya Muhaimin menyatakan, dengan adanya SOP itu akan tampak secara jelas prosedur penyelenggaraan ebtanas secara keseluruhan. Dari sana juga akan terlihat siapa yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, misalnya, yang berkaitan dengan pengadaan dan penggandaan soal di tingkat nasional.

"Jadi, kalau sampai terjadi kebocoran soal akan mudah ditelusuri dan diketahui siapa yang harus mempertanggungjawabkan kejadian itu," kata Yahya.

Sementara itu, dari segi penyaluran, pemakaian, dan pertanggungjawaban keuangan, Depdiknas juga membuat pedoman pelaksanaannya. Di dalamnya termuat mekanisme penyaluran bantuan biaya ebtanas dari pusat kepada siswa SD dan SLTP atau yang sederajat.

Sesuai alokasi dana yang tersedia, unit *cost* bantuan biaya penyelenggaraan ebtanas siswa adalah, untuk SD SDLB sebesar Rp 20.000 per siswa. Untuk SLTP/MTs sebesar Rp 23.000 per siswa **(lihat tabel 1 dan 2)**. Akan tetapi, menurut Sekretaris Dirjen Dikdasmen Baedhowi, perkiraan tersebut bukan harga mati. "Setiap daerah—dalam hal ini provinsi—bisa membuat perkiraan sendiri berdasarkan kondisi daerahnya. Plafon maksimal adalah angka itu, tetapi kalau uangnya berlebih, ya, harus dikembalikan kepada negara," katanya.

Sesuai kondisi provinsi, Depdiknas membuat kategori provinsi sebagai dasar penentuan satuan harga. Sebagai pegangan awal, ada empat kategori pembiayaan yang ditawarkan, yakni A (DKI Jakarta, Jabar, Jateng Jatim, Lampung, Bali, Banten); B (DI Yogyakarta, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, DI Aceh, Sulsel, Bangka Belitung; C (Jambi, Bengkulu, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, Sulut, NTT, NTB, Gorontalo); dan D (Irian Jaya, Maluku, dan Maluku Utara). **(tri)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Tabel 1 BIAYA PENYELENGGARAAN EBTANAS

SD/SDLB/MI (5 mata ujian)

No	URAIAN KEGIATAN	KATEGORI (Dalam rupiah) A	B	C	D
1	Pencetakan dan pengepakan naskah tes (65 hlm)	3.250	3.250	3.250	3.250
2	Pengiriman naskah ujian	650	725	800	900
3	Penyimpanan naskah ujian	250	250	250	250
4	Honorarium pengawas ujian	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Honorarium kepanitiaan/posko	650	500	500	500
6	Pengiriman kembali hasil pekerjaan siswa (LJK)	650	725	800	900
7	Pemeriksaan hasil	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Biaya rapat/koordinasi (honor, konsumsi, transpor)	650	725	800	900
9	Pengisian dan pengesahan STTB dan Danem	300	300	300	300
10	Pembuatan kartu peserta ujian	400	400	400	400
11	Penyusunan dan penggandaan pedoman/juknis/juklak	300	300	300	300
12	Biaya lain-lain (penyalinan naskah ke dalam huruf braille, konsumsi, monitoring evaluasi, administrasi, alat tulis kantor pengolahan data, pelaporan, ketamatan D II)	3.250	3.250	3.250	3.250
	Jumlah	**19.850**	**19.925**	**20.150**	**20.450**
	Biaya rata-rata		**20.094**		

Tabel 2 BIAYA EBTANAS SLTP/MTs (6 mata ujian)

No	URAIAN KEGIATAN	KATEGORI (Dalam rupiah) A	B	C	D
1	Pencetakan dan pengepakan naskah tes (100 hlm	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Pengiriman naskah ujian	700	800	850	900
3	Penyimpanan naskah ujian	300	300	300	300
4	Honorarium pengawas ujian	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Honorarium kepanitiaan/posko	500	500	500	500
6	Pengiriman kembali hasil pekerjaan siswa (LJK)	700	800	850	900
7	Pemeriksaan hasil	4.300	4.300	4.300	4.300
8	Biaya rapat/koordinasi (honor, konsumsi, transpor)	700	800	850	900
9	Pengisian dan pengesahan STTB dan Danem	300	300	300	300
10	Pembuatan kartu peserta ujian	400	400	400	400
11	Penyusunan dan penggandaan pedoman/juknis/juklak	300	300	300	300
12	Biaya lain-lain (penyalinan naskah ke dalam huruf braille, konsumsi, monitoring evaluasi, administrasi, alat tulis kantor pengolahan data, pelaporan, ketamatan D II)	3.250	3.250	3.250	3.250
	Jumlah	**22.450**	**22.750**	**22.900**	**23.050**
	Biaya rata-rata		**22.787,5**		

Sumber: Depdiknas

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 24 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 1-D
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : NASUTION, Andi Hakim
No_Klass/Subjek : 378 / PERGURUAN TINGGI - SYARAT MASUK.

Segi Tiga Emas Tengah-Tahunan

JIKA bepergian ke Chiang-Rai di bagian Utara Thailand, bonus pesiarnya biasanya adalah berkunjung ke perbatasan. Ke utara tampak kawasan Birma dan ke timur laut kawasan Laos. Itulah daerah segi tiga emas yang terkenal. Bukan emas kuning, melainkan emas hitam getah *Papaver somniferum* yang sudah berbentuk damar kering dan bernama candu. Di desa itu kita dapat membeli bunga candu yang sudah dikeringkan sebagai hiasan. Rupanya mirip buah majemuk teratai. Di kawasan Birma, kala saya berkunjung itu, mereka sedang membangun sebuah kasino, khusus untuk mengeruk uang dollar wisatawan asing.

Di desa kawasan wisata Thailand itu juga dijual barang kerajinan penduduk setempat, berupa pakaian lokal yang bahannya terdiri atas kain katun hitam yang disulam beraneka warna. Pola sulamannya berbentuk bunga yang amat indah. Baru setelah dibawa pulang sebagai oleh-oleh dan dikenakan oleh ketiga anak-anak saya di rumah, saya sadar, sulaman yang amat indah itu tidak lain dan tidak bukan adalah motif bunga papaver penghasil candu.

◆◆◆

DI Indonesia juga ada segi tiga emas, ketiga titik sudutnya adalah ebtanas (evaluasi belajar tahap akhir tingkat nasional), UMPTN, dan bimbingan belajar. Ebtanas katanya mengukur prestasi penguasaan lulusan SMU terhadap bahan pelajaran yang diikutinya selama tiga tahun di SMU. UMPTN katanya adalah ujian untuk mengukur apakah lulusan SMU sudah siap mengikuti kuliah di perguruan tinggi (PT). Itu adalah perbedaannya.

Persamaannya, keduanya dilaksanakan sebagai serangkaian pertanyaan yang jawabnya tinggal memilih dari empat jawaban yang tersedia. Yang dipilih, haruslah yang paling tepat. Baik di UMPTN maupun di ebtanas, pasti pernah ditanyakan untuk menentukan akar suatu persamaan kuadrat. Penyelesaiannya seharusnya dicari menggunakan rumus diskriminan. Kenyataannya, cara menjawabnya adalah memilih dari empat calon jawab yang tersedia, mana saja yang bila diisikan ke persamaan itu akan bernilai nol.

Mahasiswa baru yang lulus dengan cara ini, memasuki PT seakan-akan disiapkan untuk menjadi arsitek perancang jembatan. Saat diminta merancang jembatan pintasan melewati Cikapundung Kolot di kawasan Soreang, ia akan mengharap disediakan calon rancangan jembatan sebanyak empat buah. Dari empat rancangan itu ia akan memilih rancangan yang "benar"!

Bahwa materi uji yang disediakan UMPTN dan ebtanas akhirnya sama disebabkan cara melaksanakan ujiannya semuanya sama, yaitu hanya pada peringkat penguasaan pengetahuan yang terendah. Bila benar ebtanas dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang diterimanya di SMU, tolong tunjukkan kapan saja di ebtanas pernah diujikan kemampuan membuktikan suatu teorema menggunakan induksi matematika.

Padahal bahan itu ada dalam silabus. Bahkan di UMPTN saja pertanyaan mengenai proses seperti itu tidak pernah dapat diajukan karena semua butir uji mengacu ke pilihan ganda. Tetapi di UMPTN hal itu dapat dimanfaatkan karena maksudnya untuk mengukur kesiapan calon mahasiswa mengikuti kegiatan akademik di PT. Memang tepat asal saja semua pihak di PT mau mengakui, di PT mereka hanya mengajar mahasiswanya menjadi robot.

◆◆◆

APA saja perbedaan ebtanas dengan UMPTN bila nilai skor total ebtanas dan nilai total UMPTN sama baiknya untuk meramalkan mana lulusan SMU yang pantas diterima di PT. Tebaran nilai-nilai itu, dengan menempatkan nilai UMPTN di sumbu X dan nilai ebtanas di sumbu Y atau kebalikannya, akan menghasilkan tebaran titik berbentuk elips dengan sumbu utama bergerak naik dari kiri ke kanan. Kenyataannya tebaran titik itu berupa persegi. Titik-titik yang menyimpang dari elips di atas sumbu utama berasal dari lulusan SMU dengan nilai ebtanas dongkrakan. Yang di bawah sumbu utama, yaitu yang nilai ebtanasnya rendah tetapi nilai UMPTN-nya tinggi, berasal dari karya ilmiah perjokian. Hasil karya para joki ini sebagian besar dapat dieliminasi.

Namun, bayangkan bila saringan masuk ke PT hanya dilakukan melalui ebtanas. Banyak benar yang seharusnya tidak masuk, akan menjadi mahasiswa calon DO di PT. Bila PT-nya takut men-DO karena ada ancaman mogok-makan, misalnya, jadilah mereka punya gelar sarjana namun tidak punya kemampuan sarjana.

Datanglah uluran tangan berupa jasa baik usaha-usaha bimbel. Visinya jelas, ingin membangun lulusan SMU agar mampu menjadi mahasiswa di PT unggulan. Misinya tidak perlu disebut di sini. Dengan bimbingan intensif sehingga menemukan strategi menghitam-hitamkan bulatan di atas lembar jawaban ujian, orang yang kuat menghafal pasti akan dapat lolos masuk ke PT unggulan. Tetapi kelolosan itu tidak menjamin kelulusannya dari PT.

Hitunglah berapa volume uang yang hilang mubazir dan hitung pula berapa anggaran yang sebenarnya dapat dihemat dari pengeluaran orangtua dan dialokasikan untuk perbaikan mutu sekolah formal. Hitung pula kemubaziran penyusunan silabus karena guru tidak lagi mengindahkan silabus. Yang diindahkan adalah bentuk-bentuk soal dari bank soal UMPTN dan itu pula yang dicontohkannya untuk ebtanas.

Misalnya, dalam bahan pelajaran statistika SMU, saya hapus banyak rumus yang tidak berguna. Kenyataannya di Jakarta siswa SMU harus menghafal 50 rumus statistika karena rumus-rumus itu ditanyakan di ebtanas dan UMPTN. Padahal rumus-rumus itu tidak perlu dihafal, namun harus dipahami, karena itu analisis data biasa dilakukan dengan buku terbuka.

Kalau kita tidak percaya lagi akan sekolah formal, sebaiknya semua sekolah formal ditutup dan peranannya digantikan oleh usaha bimbingan belajar. PT hanya tinggal melaksanakan UMPTN dan menerima mereka yang skornya tinggi untuk menjadi mahasiswa tanpa pusing-pusing meminta STTB dan daftar NEM ebtanas. Akhirnya dapat disimpulkan, dalam kawasan yang dibatasi segitiga yang ditentukan ebtanas, UMPTN, dan bimbingan belajar tersembunyi harta karun yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

* **Andi Hakim Nasoetion**, *Gurubesar IPB diperbantukan sebagai Ketua STT Telkom Bandung*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 17 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 33 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 381.3 / PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kiat Memilih Deterjen: Banyak Busa

Belum Tentu Lebih Bersih

POSISI konsumen, khususnya yang mengonsumsi deterjen pencuci pakaian, memang masih berada dalam posisi lemah. Berbeda dari produk lainnya seperti kosmetika dan obat-obatan yang izinnya sama-sama dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), produk deterjen untuk mencuci pakaian sama sekali tidak dilengkapi komposisi bahan.

PADAHAL, dari komposisi bahan tersebut konsumen yang kritis akan dapat mempertimbangkan kualitas produk seperti daya bersihnya, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan.

Pencantuman komposisi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap tanggung jawab produsen untuk menginformasikan produknya secara transparan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 tentang Hak Konsumen dan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu *tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.*

Jadi, berhubung tidak satu pun pembanding kualitas produk dari komposisi bahan, maka kriteria yang menjadi andalan konsumen untuk memilih deterjen semakin terbatas. Dari beberapa kriteria yang masih tersisa tersebut, YLKI mencoba melakukan perbandingan harga dikaitkan dengan apa yang ditawarkan produsen melalui klaim-klaim di dalam label kemasannya.

Pertimbangan harga

Dari hasil survei pasar YLKI pada tanggal 7 Juni 2002, memang terdapat rentang perbedaan harga deterjen bubuk. Dalam hal ini, konsumen harus cukup jeli dalam melihat takaran yang dianjurkan, dikaitkan dengan harga dan berat kemasan. Perhitungan sederhana yang dilakukan oleh YLKI berdasarkan klaim label menunjukkan bahwa walaupun Surf cukup murah dibandingkan harga deterjen lain, tetapi untuk harga per sekali cuci dengan takaran menggunakan 10 liter air, Surf [redacted] mempati sebagai harga produk yang paling mahal.

Sedangkan dari analisis a- yang dilakukan YLKI, dapat diketahui beberapa produk memang mencantumkan surfaktan LAS (*linear alchyl benzene sulfonate*), tanda peringatan, logo/klaim ramah lingkungan, klaim mengandung enzim dan klaim busa.

Surfaktan merupakan zat aktif permukaan yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan air, sehingga kotoran dapat lepas dari kain. Beberapa produsen menambahkan enzim dengan maksud membantu menghilangkan noda protein, lemak, dan darah yang sukar dihilangkan melalui pencucian biasa. Tetapi, ternyata dari hasil uji YLKI, enzim hanya akan sangat bermanfaat bila dipakai pada pencucian dengan air hangat.

Sedangkan logo/klaim ramah lingkungan berkaitan dengan penggunaan jenis surfaktan oleh produsen. LAS adalah komposisi kimia surfaktan yang disebut produsen sebagai ramah lingkungan. Pada kondisi *aerob* (cukup oksigen dan mikroorganisme), LAS memang cepat terurai. Tetapi, LAS tidak dapat terurai pada kondisi *anaerob* (tidak terdapat udara), sehingga jika badan air memang sudah menghitam seperti kondisi sungai Jakarta, akan terjadi kondisi *anaerobik* yang tidak memungkinkan LAS terurai. LAS yang tidak terurai ini memiliki efek sangat toksik bagi organisme (cukup dapat mematikan ikan dalam kadar 3-10 mg/liter) dan bersifat bioakumulatif (tersimpan dalam jaringan). Tetapi, konsumen tetap dapat lebih memilih produk dengan klaim ini, karena kepedulian konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan paling tidak merupakan awal membangun sistem yang baik.

Kemudian, untuk kesehatan dan keselamatan konsumen, beberapa produsen memang telah mencantumkan kalimat "lembut di tangan" dan "tanda peringatan" pada kemasan produk deterjen. Hal ini memang belum cukup lengkap, tetapi konsumen dapat memilih produk yang memang bisa menginformasikan hal-hal yang dibutuhkannya. Apalagi jika produsen telah memasang jalur komunikasi dengan konsumen melalui *hotline*, maka kebutuhan konsumen akan informasi dan pengaduan dapat langsung diterima produsen.

Klaim busa banyak?

Beberapa produk sama sekali tidak mencantumkan keterangan bermanfaat kepada konsumen kecuali sekadar klaim *boom* busa yang sebenarnya menyesatkan. Padahal, busa merupakan indikator yang langsung dapat dilihat sebagai penyebab masalah lingkungan dan sedikit kaitannya dengan daya bersih deterjen. Klaim *boom* busa ini masih terdapat pada deterjen merek Daia, Sanbrite, dan Total Harum.

Perpustakaan Unikom hlm 256

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

Masalah busa ini sekali lagi perlu mendapat perhatian, karena survei sementara YLKI memang menunjukkan ibu-ibu yang mencuci pakaian menyukai faktor "banyak busa" untuk lebih meyakinkan dalam mencuci.

Pertimbangan banyak busa tentu pertimbangan yang salah kaprah karena banyaknya busa tidak berkaitan secara signifikan dengan daya bersih deterjen. Dan, jika produsen masih memandang ketidaktahuan konsumen tersebut justru sebagai kesempatan untuk meningkatkan penjualan, sementara pemerintah juga diam saja, maka berarti posisi konsumen memang masih sama seperti yang disebutkan Wayne Ellwood, Bapak Gerakan Konsumen yaitu *"...Konsumen lebih sering dilihat sebagai mesin yang tak berkepribadian* (depersonalized machines)*, manusia tunggal matra* (one-dimensional human beings) *yang tujuannya cuma menyerap habis arus produk yang tak kunjung berhenti".*

ILYANI A SUDRADJAT
Bekerja di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

ANALISA LABEL DETERJEN BUBUK

No	MEREK	HARGA/ 1 Kg*	TAKARAN, 10 L TER AIR	HARGA/ CUCI*	BAHAN AKTIF	LOGO/ KLAIM HIJAU	PERI-NGATAN	KLAIM ENZIM	KLAIM BUSA
1	Attack Double	Rp 11.700,-	25 gr	Rp 292,5	LAS-Na 29,5%	Bersahabat dengan lingkungan	✓	✓	✗
2	B-29	Rp 7.975,-	1 genggam	Rp 239,5	✗	✗	✗	✗	✗
3	Daia	Rp 7.900,-	30 gr	Rp 237,0	LAS	LAS mudah terurai dalam air	✗	✗	✓
4	Dino	Rp 9.500	1 genggam	Rp 285,0	✗	✗	✗	✓	✗
5	Le-Britie	Rp 7.450,-	1 genggam	Rp 223,5	✗	✗	✗	✓	✗
6	Rinso Anti Noda	Rp 10.480,-	1 sendok takar	Rp 314,7	✗	Hanya menggunakan bahan aktif Surfaktan yang ramah lingkungan	✓	✗	✗
7	Sanbritie	Rp 6.475,-	2 genggam	Rp 387,7	✗	✗	✓	✓	✓
8	So Klin Power	Rp 9.575,-	1 genggam	Rp 287,5	LAS	LAS mudah terurai dalam air	✗	✗	✗
9	Surf	Rp 8.080	2 genggam	Rp 483,8	✗	Bahan aktif biodegradable	✓	✗	✗
10	Total Harum	Rp 7.500	1 genggam	Rp 225,2	✗	✗	✓	✗	✓

Keterangan : Asumsi 1 genggam dan 1 takar-30gr
*Harga per-7 Juni 2002. Harga per-cuci, dihitung berdasarkan harga per pemakaian deterjen dalam 10 liter air

TAUFAN

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 15 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 19 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : Kusuma, Guyung Wijaya
No_Klass/Subjek : 382 / PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ekspor-Impor Tanpa Valuta Asing

AKHIRNYA, Pemerintah Indonesia dan Thailand menandatangani *Memorandum of Agreement on account trade*, setelah melakukan pembicaraan mengenai rencana imbal dagang tersebut selama dua tahun, dan diintensifkan lagi dalam tiga bulan terakhir. Lewat pola ini kerja sama dagang yang dilakukan bukan lagi sekadar imbal dagang biasa atau barter komoditas secara langsung, melainkan sebuah perdagangan barang biasa yang tak lagi menggunakan dana valuta asing yang harus dikeluarkan oleh kedua negara untuk perdagangan tersebut.

DALAM pola kerja sama itu, Indonesia diwakili badan Urusan Logistik (Bulog) yang akan membeli beras dari Thailand, tetapi uang pembelian dari Bulog itu tidak ditransfer langsung ke Thailand, melainkan disimpan di Bank Mandiri dalam bentuk mata uang rupiah. Sebaliknya, seluruh dana yang diserahkan Pemerintah Thailand untuk membayar pesawat, gerbong kereta, dan pupuk yang dibeli dari Indonesia, tetap berada di rekening ThaiExim untuk digunakan membayar beras yang dibeli Bulog.

Jadi, inti dari imbal dagang antara Indonesia-Thailand sebenarnya terletak dari rekening *escrow account* yang dibuka oleh masing-masing negara. *Escrow account* ini akan digunakan saat memenuhi kewajiban jika terjadi transaksi perdagangan dari kedua negara yang berjanji tersebut.

Dalam kesepakatan perjanjian itu ditandatangani oleh masing-masing pelaku bisnis. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator atau payung untuk menjamin perjanjian dagang tersebut. Masing-masing pengusaha tersebut adalah Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) Jusman SD, Presiden Direktur (Presdir) Industri Kereta Api (Inka) Roos Diatmoko, Presiden Direktur PT Pusri Zaenal Soedjais, dan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. Pihak Thailand diwakili Menteri Pertanian dan Koperasi Petipong Pungbun Na Ayudhya, Deputi Gubernur Pemerintah Bidang Pembangunan dan Perencanaan Sriyoudh Sirivedhin, dan Direktur Pemasaran Organisasi untuk Pertanian Kerajaan Thailand Sunchai Prasurdsuwan.

Dalam klausul nota kesepakatan disebutkan, PT DI menjual pesawat yang akan dibeli Pemerintah Thailand untuk menggantikan armada pesawat untuk proyek hujan buatan Kerajaan Thailand yang sudah tua. Selain itu, Pemerintah Thailand juga akan membeli gerbong peti kemas dari PT Inka dan juga pupuk amoniak, granular urea, dan urea pril dari PT Pusri. Dalam nota kesepakatan tersebut, seluruh produk Indonesia yang dijual dengan pola imbal beli beras ini mencapai nilai 40 juta dollar AS.

Dalam perjanjian itu, Bulog akan membeli beras dari Thailand, yang volumenya diperkirakan sebesar 200.000 ton. Jumlah ini tetap mengacu pada tingkat produksi nasional. Artinya, jika produksi berkurang kemungkinan imbal dagang itu bisa membesar, sebaliknya jika terjadi surplus produksi atau paling tidak produksi membaik, maka akan dilakukan evaluasi kembali. Prinsipnya, volume imbal dagang itu tetap mengacu pada tingkat produksi dan stok yang ada di masyarakat dan di tangan pemerintah. Tujuannya, petani tidak dirugikan akibat membeludaknya pasokan beras di pasar, sebaliknya risiko rawan pangan bisa dihindari jika terjadi musim paceklik.

◆◆◆

NAMUN, menurut Wijanarko, kemungkinan volume impor 200.000 ton ini tidak akan berkurang. Jumlah ini merupakan angka yang *feasible*, jika melihat perkembangan luas areal tanam, kondisi iklim, dan kemungkinan produksi pada musim tanam mendatang. Rencananya dari jumlah beras impor sebesar itu akan dibagi dalam empat kali kontrak pengiriman, masing-masing sebesar 50.000 ton. Kemungkinan lama waktunya sekitar empat bulan ke depan.

"Tapi, jangan lupa beras impor ini tidak akan langsung masuk ke pasar. Komoditas itu akan menjadi stok penyangga sebagai alat penyelamat negara, jika ada suatu wilayah yang mengalami musim paceklik, sehingga terjadi penurunan produksi. Beras impor inilah yang akan dipakai pemerintah untuk mengisi kekosongan pasar lewat program beras murah atau beras untuk orang miskin," kata Widjanarko.

Vice President Relation Management Bank Mandiri Zulkifli Zaini, yang turut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tanggal 7 Juni 2002, mengatakan, ini merupakan terobosan baru. Pola ini banyak sisi positifnya bagi kedua negara, dan hal yang paling menguntungkan dari perjanjian dagang yang baru itu adalah pemerintah tidak perlu menyediakan dollar AS untuk mendapatkan beras dari Thailand. Beda dengan pola yang lama. Walaupun bentuknya imbal dagang, mata uang yang dipakai sebagai patokan untuk membayar adalah mata uang asing dan biasanya adalah dollar AS. Dollar AS hasil dari pembelian lewat pola pertukaran itu kemudian ditransfer ke negara tersebut menjadi devisa mereka. Pada satu sisi memang ada penambahan devisa, tetapi di sisi lain menjadi beban bagi kedua negara karena harus menyediakan dollar AS.

Nah, lewat pola yang baru ini tidak. Dana penjualan yang dilakukan oleh Thailand maupun Indonesia tidak ditransfer. Beras yang dijual oleh Thailand, uangnya bukanya dibayarkan langsung ke Thailand, tetapi di simpan di *escrow account* di Bank Mandiri dalam bentuk rupiah. Dana itu baru dapat digunakan sampai terjadi transaksi

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

pembelian barang di Indonesia oleh Thailand. Pola ini jelas sangat menguntungkan karena nilai jualnya tidak akan mengalami fluktuasi yang membuat pengusaha kedua negara terpukul jika ada penurunan atau kenaikan kurs nilai tukar.

"Perjanjian *account trade* akan membuat kondisi perdagangan yang unik. Sebab, perdagangan benar-benar terjadi, tetapi tidak terjadi aliran dana. Hal ini akan menguntungkan kedua negara, sebab perdagangan dilakukan hanya dengan menggunakan mata uang masing-masing negara sehingga dapat menghemat devisa," ujar Zulkifli.

Presdir DI Jusman SD mengatakan, istilah *account trade* dalam nota kesepakatan adalah istilah baru yang dicetuskan oleh Menperinddag Rini MS Soewandi. Cara tersebut benar-benar menguntungkan, karena Indonesia bisa mendapatkan beras sekaligus dapat mengikat negara pengimpor untuk membeli produk dari Indonesia.

Setidak-tidaknya lewat pola ini, dua tujuan sekaligus bisa direngkuh pemerintah. Pertama, Indonesia bisa dapat beras untuk menjadi stok berjaga-jaga. Kedua, Indonesia juga langsung mendapatkan pasar yang pasti untuk komoditas yang tidak mudah mendapatkan pasar, seperti gerbong kereta dan pesawat terbang, kata Jusman.

Lepas soal benar atau tidak pengakuan sulitnya PT DI memperoleh pasar, yang jelas kesepakatan ini telah menguntungkan industri pesawat milik negara yang dulu dibanggakan sebagai simbol kemajuan teknologi industri Indonesia. Paling tidak, kapasitas produksi PT DI pesawat CN 235 sebanyak 10 unit per tahun sudah ada yang pasti pasarnya.

Hal itu pun diakui Sales Manager PT DI untuk Thailand Subagio. Menurut Subagio, penjualan pesawat dalam imbal dagang sangat strategis bagi perusahaannya. Apalagi, saat ini The Royal Rainmaking, Thailand, sedang dalam program mengganti 11 pesawat mereka yang sudah tua. Dengan demikian, terbelinya satu pesawat dari Indonesia akan menjadi pintu untuk mendapat pesanan lebih banyak lagi. Dia berharap, Pemerintah Thailand memesan CN 235 yang bernilai 16 juta dollar AS, bukan Cassa yang hanya tiga 3 juta dollar AS.

Menurut Subagio, sebenarnya Thailand sudah membeli sebanyak tujuh pesawat yang diproduksi PT DI, yakni lima buah jenis Cassa 212 dan dua buah CN 235. Pesawat CN 235 digunakan Pemerintah Thailand untuk armada pembuat hujan buatan yang berada di bawah kendali langsung Kerajaan Thailand. Pesawat tersebut dirancang cukup istimewa karena bisa dimodifikasi menjadi pesawat penumpang dalam waktu singkat.

PT Inka pun mengalami kondisi kelesuan yang sama. Kapasitas produksi yang mereka miliki mengalami *idle* yang cukup besar. Kapasitas terpasang sebanyak 300 unit gerbong per tahun, namun tak sepenuhnya bisa dicapai karena respons pasarnya masih rendah.

Dengan adanya perjanjian imbal dagang yang memilih salah satu produknya adalah gerbong barang dari a-ka membuat perusahaan ini bisa menfaatkan kapasitas yang *nganggur*. Apalagi, dalam tahap awal ini, Pemerintah Thailand diperkirakan akan membeli gerbong kereta api sebanyak 112 unit.

Melihat pentingnya pasar bagi PT DI dan Inka, maka Indonesia mengambil keuntungan dari dua sisi, yakni sebagai pembeli yang mendapatkan beras dan sebagai penjual yang mendapatkan pasar. Namun, seperti yang ditegaskan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawarta, perjanjian harus *win-win* antara kedua negara. Oleh sebab itu, kita harus merelakan Bulog membeli beras Thailand dan PT Pusri mengekspor pupuk ke Thailand.

◆◆◆

NAMUN, tak seluruhnya sebuah pola baru, apalagi barter dengan beras bisa memperoleh jalan yang mulus. Paling tidak aktifnya Menperindag Rini MS Soewandi bersama Kepala Bulog Widjanarko melakukan imbal dagang dengan beras telah melahirkan polemik pro-kontra yang panjang. Bahkan, dalam konteks imbal dagang yang baru dilakukan dengan Thailand, banyak yang protes. Pasalnya, pupuk yang selama ini dianggap sebagai produk strategis dan masih dibutuhkan di dalam negeri harus di ekspor. Ketakutan publik, jika produk strategis itu diekspor takut maka pupuk di dalam negeri tak tercukupi. Ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

Pada satu sisi impor beras bisa merusak pasar beras dalam negeri, yang ujungnya merugikan ekonomi petani. Di tengah kekhawatiran itu pupuk di ekspor, sedangkan beberapa bulan terakhir justru terjadi kelangkaan pupuk. Kalau keran ini dibuka, ditakutkan akan merugikan petani.

Polemik inilah yang akhirnya membuat rencana imbal dagang yang sedianya akan dilakukan akhir April 2002 diundur hingga batas waktu pertengahan Juni 2002. Semua itu untuk mendudukkan persoalan kepada publik Indonesia maupun Pemerintah Thailand bahwa kebijakan ini adalah sa-

Walaupun, menurut sumber di lingkup Kantor Perdana Menteri Thailand maupun di Bulog, Thailand tidak setuju untuk diimbal dagang dengan gerbong maupun pesawat, negara itu bersedia untuk melakukan imbal dagang jika Indonesia mau melepaskan pupuk amoniak dan ureanya, baik yang granular maupun pril. Thailand pun *ngotot* karena mereka memang tidak butuh gerbong atau pesawat. Namun, Indonesia pun tak kalah sengit, mereka bersedia membeli kelebihan beras Thailand yang bingung menling mengutungkan.

Namun, menurut pengakuan Rini, jika Bulog hanya memikirkan mengenai kecukupan stok berasnya tanpa mencari pasar bagi produk Indonesia, akan jauh lebih enteng urusannya. Oleh karena itu setelah mempertimbangkan peluang untuk mendapatkan pasar bagi produk Indonesia yang punya nilai tambah dari bisnis pembelian beras oleh Bulog, pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengurus imbal dagang tersebut. Dalam kurun tiga bulan, Thailand pun akhirnya setuju.

cari pasar dengan tiga komoditas yang sudah ditawarkan sejak awal.

Tampaknya Thailand memperoleh jalan keluar karena beras yang ada di gudang harus segera dilepas. Kalau tidak, mereka akan mengalami problema manajemen stok yang justru akan menjadi beban biaya baru bagi Thailand.

Lepas dari tarik ulur tersebut, yang jelas kemampuan Menperindag untuk menekan Thailand harus diakui sebagai strategi yang jitu.

VIJAYA KUSUMA
dari Bangkok)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

PERDAGANGAN THAILAND – INDONESIA (DOLLAR AS)

	2000	2001	SELISIH (DOLLAR AS)	SELISIH (%)
• Ekspor Thailand	1.341.119.701	1.404.401.392	63.281.691	4,72
• Impor Thailand	1.296.002.494	1.404.206.497	108.204.003	8,35
• Neraca Perdagangan	45.117.207	194.896	(44.922.311)	(99,57)
• Nilai Perdagangan	2.637.122.195	2.808.607.889	171.485.694	6,50

PERDAGANGAN LUAR NEGERI THAILAND (DOLLAR AS)

• Ekspor Thailand	69.270.162.095	67.127.044.084	(2.143.118.011)	(3,09)
• Impor Thailand	62.198.461.347	63.959.524.362	1.761.063.015	2,83
• Neraca Perdagangan	7.071.700.748	3.167.519.722	(3.904.181.026)	(55,21)
• Nilai Perdagangan	131.468.623.442	131.086.568.445	(382.054.997)	(0,29)

Sumber: Trade Statistic Center, Ministry of Commerce of Thailand
Diolah : Kantor Atase Perindustrian dan Perdagangan- KBRI Bangkok

DICKY

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 10 / APRIL / 2003
Him/Kolom : 9 / I-A
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SUBIANTO, Henry
No_Klass/Subjek : 384 / MEDIA MASA

Perang dan "Journalism of Attachment"

GEGAP gempita serangan Amerika Serikat ke Irak benar-benar menjadi "magnet" pemberitaan berbagai media massa di dunia. Televisi, radio, dan media cetak berlomba menampilkan berita dan gambar paling menarik, paling hangat, dan paling dramatis.

Di televisi sering pemandangan tank-tank modern dari tentara koalisi, sigap menembus badai dan padang pasir untuk menaklukkan Irak. Pemandangan lain kapal perang dan pesawat tempur koalisi melesat dan membom, menyusul ledakan-ledakan besar dengan api dan asap membubung di udara. Disusul jerit tangis wanita dan anak-anak di samping bangunan-bangunan yang hancur dan tubuh-tubuh bergelimpangan. Korban tewas dan cedera justru lebih banyak rakyat sipil, anak-anak, wanita, dan orang tua. Bom dan rudal canggih pasukan koalisi ternyata tidak punya mata, sasarannya tak selalu instalasi militer atau kantor pemerintahan, tetapi juga rumah penduduk, pasar, pertokoan, rumah sakit bersalin, hingga tempat ibadah.

◆◆◆

DALAM konteks ini media massa dihadapkan pada peristiwa, kekuatan militer amat besar dan canggih sedang menggempur negara "miskin" yang sudah diembargo selama 12 tahun. Sementara sebelum perang, atas nama PBB, Irak sudah berkali-kali ditekan dan dilucuti senjatanya. Namun apa yang terjadi di lapangan, ternyata pemerintah bersama rakyat Irak dengan gigih memberi perlawanan.

Maka drama perang kemanusiaan yang dahsyat pun terjadi. Banyak wanita dan anak Irak yang tewas, cacat seumur hidup, atau kehilangan keluarga, tanpa tahu mengapa harus ada perang dan mengapa mereka menjadi sasaran.

Semua itu kian menambah kontroversi perang yang diputuskan sepihak oleh AS dan Inggris tanpa dukungan mandat PBB. Tak heran jika sebagian besar masyarakat dunia menentangnya, bahkan beberapa pihak menganggap serangan ini sebagai *crime against humanity* sekaligus pelanggaran hukum internasional.

Ada yang menyebut penghancuran atas *the cradle of civilization* termasuk situs-situs peninggalan Islam yang bertebaran di negeri 1.001 malam itu.

Arogansi unilateralisme AS, ketidakseimbangan kekuatan, dan banyaknya kehancuran dengan jatuh korban rakyat sipil, membawa kemarahan di mana-mana. Harga diri sebagai bangsa Arab tersentuh, seruan jihad pun menggema di seantero Irak, bahkan di beberapa negara Arab lain. Sentuhan simpati pada rakyat Irak muncul di mana-mana. Banyak orang tidak habis pikir, "Inikah yang disebut George W Bush sebagai pembebasan bagi bangsa Irak?" Tetapi mengapa harus mengorbankan banyak rakyat sipil? Hingga rumah sakit penuh sesak dengan jerit tangis, kematian, sekarat, dan derita rakyat Irak tak berdosa. Mengapa harus demikian?

Kalau rakyat Irak marah melihat itu semua, bagaimana dengan wartawan yang meliput peristiwa tragis ini? Memang saat perang terjadi, media massa tak lagi sekadar penyebar berita, tetapi sering menjadi *part of the front line*. Dimanfaatkan sebagai corong propaganda perang komunikasi.

◆◆◆

TERLEPAS dari pemanfaatan oleh pihak-pihak yang bertikai, wartawan peliput perang sering larut, tersentuh, dan simpati terhadap korban, khususnya warga sipil Irak. Sebagai manusia yang bernurani, dalam meliput perang yang tak seimbang, wartawan tak bisa hanya menjadi sekadar pengungkap fakta, tetapi juga terkait fakta itu. Tuntutan obyektivitas pemberitaan sering ditinggalkan. Netralitas sebagai pedoman etika pemberitaan sering menjadi tidak relevan.

Hal demikian diakui bahkan dianjurkan Martin Bell, wartawan senior BBC yang pernah meliput sebelas perang, sejak Perang Vietnam, El Savador, Malvinas, Perang Teluk pertama, hingga Bosnia. Dia menganjurkan peliputan yang disebut *journalism of attachment*, yang peduli, tahu, dan ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya tragedi kemanusiaan. Dikatakannya, *"By this I mean a journalism that cares as well as knows, that is aware of its responsibilities, that will not stand neutrally between good and evil, right and wrong, the victim and the oppressor"* (Kieran 1999, hal 16).

Menurut Martin Bell kejahatan perang dalam skala besar mungkin tidak akan terjadi seandainya ada kamera televisi yang meliputnya. Dengan kata lain berita tidak hanya sekadar menggambarkan kenyataan, tetapi berita juga bisa membantu membuat kenyataan.

Terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada dasarnya membutuhkan rekanan. Bukan hanya kebencian dan kekejaman yang menyebabkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga peran media yang tak peduli dan membiarkan itu terjadi.

Keikutsertaan kru televisi dan wartawan dalam rombongan tentara koalisi menyerang Irak sebenarnya bisa menjadi saksi perilaku tentara di medan perang. Komandan militer di lapangan selain menentukan taktik perang, juga harus memikirkan penayangannya di televisi. Maka banyak tawanan perang diperlakukan "lebih manusiawi" karena kehadiran media. Sayang televisi Barat seperti CNN, MSNBC, CNBC, SKY Television, ITV, dan Fox

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

liputannya lebih banyak di seputar gerakan tentara koalisi, tragedi kemanusiaan di wilayah Irak kurang mendapat tempat.

Sementara TV Al Jazeera, Al Arabiya, Abu Dhabi Television yang mempunyai akses ke Irak lebih luas dan banyak memberitakan sisi kehancuran peradaban dan "pembantaian manusia", beritanya tidak banyak sampai di AS atau sekutunya seperti Australia.

Kalau perang ini tetap berlanjut dan korban sipil kian banyak, tragedi kemanusiaan itu bukan hanya sekadar karena kenekatan George W Bush dan Tony Blair, tetapi juga peran "rekanan" mereka, yaitu media-media yang tidak acuh dengan kehancuran peradaban di Irak dan korban sipil yang begitu banyak.

Seandainya CNN dan lainnya sering mengungkap korban sipil dan korban di pihak koalisi, mungkin ceritanya berbeda. Opini publik di AS dan Inggris bisa jadi akan mendesak pemerintah kedua negara untuk menghentikan perang. Sayang jurnalisme keterkaitan (*journalism of attachment*) yang berorientasi pada korban perang justru lebih banyak ditemui pada media massa di negara yang sejak awal antiperang, seperti di Jerman, Perancis, Rusia, Cina, dan beberapa negara Arab, serta Asia Tenggara seperti di Indonesia dan Malaysia.

◆◆◆

JURNALISME keterkaitan memang menolak netralitas dan obyektivitas pada peliputan perang yang tak seimbang. Selain dianggap tidak masuk akal penerapannya, ketidakpedulian pada korban perang dan tragedi kemanusiaan merupakan tindakan tak bermoral. Maka jangan heran jika banyak media berpihak pada Irak, menyalahkan AS, dan ikut menentang perang.

Namun, kritikan pada jurnalisme keterkaitan ini tidak sedikit. Di antaranya dikatakan, jurnalis yang baik bisa diterima dan dipercaya semua pihak, bukan yang hanya menguntungkan satu pihak. Bila ingin menghentikan tragedi kemanusiaan, jadilah aktivis HAM, bukan jurnalis. Jika ingin mempengaruhi cara berpikir orang lain, sebaiknya jadi politikus. Tugas wartawan hanya mengungkap fakta. Boleh saja bersimpati pada korban atau yang lemah, tetapi tugas utamanya bukan bersimpati namun untuk mengerti (Burgh, 2000).

Lebih jauh Dunkley (2000) mengatakan, ketika reporter mulai menunjukkan keterkaitan emosi dalam berita yang mereka laporkan, dari situ tanpa disadari hanya tinggal satu langkah lagi ke arah seleksi dan manipulasi fakta yang hanya menguntungkan satu pihak.

Terlepas dari kontroversi itu, banyak wartawan menerapkan jurnalisme keterikatan pada perang Irak. Salah satunya Peter Arnett. Dalam laporannya untuk NBC 31 Maret lalu, dia mengkritik serangan AS dan memuji kegigihan Irak. Akibatnya, wartawan senior yang dulu bergabung dengan CNN saat Perang Teluk tahun 1991, dipecat dari NBC, dan kini bergabung dengan TV Al Arabiya.

Wartawan Indonesia juga lebih banyak memberi simpati dan dukungan terhadap rakyat Irak. Apakah ini karena tuntutan moral sebagaimana *journalism of attachment* yang ingin ikut menghentikan perang dan mencegah tragedi kemanusiaan. Atau hanya mengikuti opini publik yang berkembang di sini, agar menjadi katarsis bagi publik, dan ujung-ujungnya sekadar memenuhi keinginan pasar, agar laku atau naik ratingnya?

HENRY SUBIAKTO
Dosen Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 5 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 5 / 1
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SUDIBYO, AGUS
Subjek / NO. CLASS : MEDIA MASSA / 384.8

"Al Jazeera" di Tengah Media Barat

TAK disangkal, *Al Jazeera* menjadi fenomena tersendiri dalam invasi Amerika Serikat (AS) dan koalisinya ke Irak kali ini. Televisi satelit berbahasa Arab ini mengentakkan dunia dengan tayangan eksklusif tentang dampak buruk aksi bombardir ke Irak.

Ketika media-media Barat notabene mereduksi diskursus perang semata-mata sebagai *display* kecanggihan senjata mutakhir dan taktik militer modern Barat, *Al Jazeera* menayangkan gambaran nyata dari perang yang sedang berkobar: permukiman sipil porak-poranda, anak-anak terluka dan trauma, serta ratusan orang mati mengenaskan.

Ini bukan kali pertama *Al Jazeera* "mempermalukan" media Barat. Oktober 2002, ia menjadi satu-satunya media yang mewawancarai Osama bin Laden. Sementara pers Barat, entah karena tidak ada akses atau karena soal ideologis, melaporkan perang di Afganistan hanya berdasar informasi dan data pasukan koalisi.

Lebih fenomenal lagi, *Al Jazeera* lahir dan berkembang di Arab. Sebuah wilayah dengan rezim yang sudah lama dikenal tidak ramah terhadap kebebasan pers dan kemerdekaan berbicara. *Al Jazeera* berdiri tahun 1996 di Doha, Qatar. Hingga 2001, televisi ini didanai penguasa Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Terlepas dari fakta-fakta itu, beberapa hal ikut menunjang popularitas *Al Jazeera* belakangan ini.

◆◆◆

OKTOBER 2001, Pemerintahan Bush meminta Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani menggunakan pengaruhnya untuk menekan tensi pemberitaan *Al Jazeera* (Permintaan sama juga disampaikan Pemerintahan Clinton). Ini adalah puncak kegeraman Pemerintah AS atas *Al Jazeera*. Sebelumnya, duta besar AS untuk Qatar telah beberapa kali mengajukan komplain diplomatik atas Pemerintah Qatar sehubungan pemberitaan *Al Jazeera* yang dituduh menyebarkan pandangan anti-Amerika dengan banyak mengkritik kebijakan AS di Timur Tengah, serta menjadi alat propaganda Osama bin Laden.

Menurut Peter Arnett, mantan koresponden *CNN* yang banyak dikritik Pemerintah AS karena liputannya tentang Perang Teluk, tekanan-tekanan diplomatik itu dipicu oleh kecemasan meningkatnya kritisisme atas AS di Timur Tengah. Ini terjadi justru saat AS sedang membutuhkan dukungan publik Timur Tengah atas aneka kebijakannya di wilayah ini.

Faktor inilah yang membuat *Al Jazeera* kian populer dan kuat, khususnya di mata publik Arab. *Al Jazeera* menjadi simbol kritik dan ketidakpuasan publik Arab atas kebijakan politik AS di Timur Tengah yang eksploitatif dan memecah belah.

Muncul pertanyaan, sejauh mana *Al Jazeera* membawa sensibilitas publik Arab? Sejauhmana *Al Jazeera* kritis terhadap realitas politik dunia Arab?

Pandangan kritis dalam ranah studi media meniscayakan terjadinya pemihakan media atas dasar ideologi dan nilai-nilai tertentu. Sulit mengharapkan media atau jurnalis benar-benar netral dalam melihat suatu konflik karena ideologi adalah sesuatu yang inheren dalam tiap individu, tanpa terkecuali individu media.

Al Jazeera sedikit banyak tetap mewakili sensibilitas publik Timur Tengah, seperti media Barat tak pernah bisa berhasil melepaskan "kesadaran kolektifnya" sebagai orang Barat.

Ada fakta menarik. Bukan hanya Pemerintah AS yang tidak suka atas *Al Jazeera*, namun juga rezim-rezim di Timur Tengah sendiri. Pemerintah Arab Saudi tak pernah mengizinkan *Al Jazeera* membuka perwakilannya di negara itu, juga dengan penguasa Bahrain. Pemerintah Yordania dan Kuwait mengusir perwakilan *Al Jazeera* tahun lalu (*Top Arab TV Network to Hit US Market*, Camerron W Barr, *The Christian Science Monitor*, 26/12/2002).

Mungkin karena negara-negara itu sekutu AS yang merasa "bertanggung jawab" menjaga citra dan kepentingan AS di Timur Tengah. Namun bagaimana menjelaskan kemarahan dua musuh utama AS: Syria dan Libya atas *Al Jazeera*? Juga tindakan Yasser Arafat beberapa kali mengusir koresponden *Al Jazeera* dari Ramallah?

Sebuah indikasi, *Al Jazeera* tidak menunjukkan keberpihakan atas Arab. Ia bukan hanya *watchdog* kepentingan politik Barat di Timur Tengah, namun juga bagi seluruh rezim di Arab. *Al Jazeera* sejauh ini konsisten menyoroti realitas penyelenggaraan kekuasaan di dunia Arab dengan gaya pemberitaannya yang lugas dan terang-terangan. Satu hal yang masih perlu dibuktikan: independensi *Al Jazeera* terhadap Pemerintahan Qatar.

◆◆◆

TANGGAL 13 Februari 1991, dua bom sekutu merusak distrik Ameriyya, dekat Baghdad. Lebih dari 1.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, tewas dalam pengeboman yang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

salah sasaran. Melalui televisi, aksi brutal ini menyebar ke seluruh dunia. Apa yang lalu terjadi dengan media Barat sungguh mencengangkan. Mereka marah bukan karena banyak korban sipil tewas, namun karena ada media Barat memberitakan. Kemarahan bukan tertuju pada pasukan AS dan sekutunya, namun kepada media-media yang memberitakan.

The Mail on Sunday mengatakan, pemberitaan itu bukan hanya "menjijikkan" namun juga "tak terpuji". *Today* menegaskan, koresponden yang melaporkan peristiwa itu telah memalukan negeri sendiri. *The Express* menyatakan, "menangisi korban-korban dari pihak musuh yang tak terelakkan sama saja dengan merusak dukungan terhadap perang."

Apa yang terjadi pada media-media itu? Mereka mencampuradukkan patriotisme dengan dukungan tanpa *reserve* atas ambisi pemerintah guna menundukkan negara lain.

Lebih dari itu, media-media Barat terjebak skenario militer tentang bagaimana perang harus diberitakan dan dipahami publik. Perang Vietnam menjadi pelajaran berharga bagi AS dan sekutunya.

Maka prioritas militer adalah bagaimana membatasi akses pers ke sebuah perang, lalu memanfaatkannya untuk menyebarkan *image* baru tentang perang modern. Dikampanyekan, teknologi perang terbaru telah ditemukan dan mempunyai kapasitas untuk mengeliminir sebanyak mungkin dampak buruk perang atas masyarakat sipil. Dengan teknologi baru itu target-target militer berhasil dilumpuhkan dalam sekejap, tanpa mengusik target sipil.

Di sinilah muncul *starwars syndrom*. Kecenderungan untuk menggiring diskursus tentang perang semata-mata sebagai perbincangan tentang kecanggihan strategi perang modern, persenjataan mutakhir, *high-tech armament*. Tak ada diskursus tentang perang fisik, konfrontasi dengan segala dampaknya yang mengerikan.

Larut dalam *starwars syndrom*, pers Barat kehilangan daya kritisnya terhadap sumber militer. Tidak ada kritik yang memadai saat Pentagon dengan gegabah mengklaim 98 persen rudal tomahawks yang ditembakkan pasukan AS dalam perang tahun 1991 tepat sasaran.

Juga saat Jenderal Norman Schwarzkopf mengatakan, tingkat keberhasilan rudal patriot menghalau rudal scuds mencapai 100 persen. Klaim-klaim yang melecehkan akal sehat dan tak terbukti kebenarannya di kemudian hari (Philip Knightley, 2000: 493-500).

Berapa korban yang jatuh, seberapa besar kerusakan yang terjadi, dan berapa kerugian akibat ratusan rudal dan misil yang digunakan pasukan sekutu dalam perang Teluk? Media Barat tak tertarik memberitakannya.

Hal yang sama terjadi hari-hari ini. Pemberitaan media AS, seperti *CNN, MSNBC, CNBC*, dan *Fox News* amat tak memadai karena hanya terfokus *display* pasukan sekutu yang mengepung Irak, dari segala penjuru. Di layar televisi, kita hanya bisa menyaksikan pasukan sekutu yang sedang berlatih, membersihkan senjata, atau bergerak di tengah gurun pasir dengan *image* kebesarannya. Tak ada gambaran tentang perang yang sebenarnya.

Di sinilah keberadaan Al *Jazeera* menjadi amat penting. Ia memotret perang dari sisi korban. Ia tak hanya berbicara mengapa perang harus dilakukan, senjata apa yang digunakan, namun terutama dampak-dampak buruk perang itu sendiri bagi perikemanusiaan.

Liputan-liputan *Al Jazeera* tentang tragedi kemanusiaan di Irak akibat aksi bombardir pasukan sekutu, dengan sendirinya meruntuhkan mitos tentang *starwars, high-tech armament, smart bom*, dan mitos lain yang selama ini begitu mendominasi pemberitaan media Barat. Tanpa mengesampingkan sensibilitas Arab yang diusungnya, *Al Jazeera* menjadi jendela bagi masyarakat internasional untuk mengetahui perang tetaplah perang. Bahwa perang pertama-tama adalah urusan baku bunuh dengan kekerasan.

Yang tak kalah penting, *Al Jazeera* menjadi saksi betapa gemarnya media-media Barat melakukan rekayasa dan kebohongan atas nama patriotisme yang sempit.

AGUS SUDIBYO
Peneliti media dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 27 / MARET / 2007
Hlm/Kolom : 18 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HARYONO, TRY
No_Klass/Subjek : 385 / ANGKUTAN KOTA

Lebih Mirip Mal Goyang daripada Angkutan Massal

MAU cari barang murah ? Tak perlu susah-susah. Naiklah ke atas kereta api atau kereta rel diesel (KRD) jurusan Jakarta Kota-Rangkasbitung. Atau bisa juga naik kereta kelas ekonomi, kereta rel listrik (KRL) lainnya di Jabotabek. Dijamin, berbagai barang yang dibutuhkan tersedia.

MAU mencari seragam anak sekolah, lampu senter, obeng, gunting, topi, jepit rambut, jarum hingga peniti atau celana kolor. Semua tersedia. Begitu pun makanan. Berbagai jenis makanan dijajakan mulai dari rokok, roti, dodol, kerupuk, susu, lontong, tahu, permen hingga minuman botol. Bahkan buah-buahan impor yang biasanya dijual di pasar swalayan, seperti jeruk, apel, pir, anggur hingga salak atau manggis bisa pula ditemui di angkutan massal itu.

Soal harga tidak perlu khawatir. Karena dijajakan di kereta kelas ekonomi, maka harganya pun "kelas ekonomi". Pakaian seragam sekolah, misalnya, cuma ditawarkan Rp 4.000 sebuah, gunting Rp 1.000, jepit rambut berbagai model Rp 1.000, dan bahkan peniti cuma Rp 300 selusin, lengkap mulai dari ukuran paling kecil hingga ukuran besar.

Begitu pun buah-buahan impor. Harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar swalayan. Hanya saja bedanya, buah-buahan yang dijual tidak dihitung kiloan, tetapi dihitung per biji. Rata-rata harga buah impor seperti jeruk, apel, atau pir seharga Rp 1.000 per buah. Itu pun masih bisa ditawar lagi.

"Kalau dihitung-hitung, harganya tetap lebih murah dibandingkan harga di pasar swalayan," kata Ny Erlina (30), seorang karyawati yang biasa naik kereta api Jakarta Kota-Rangkasbitung dan turun di Stasiun Serpong.

"Kita kan berdagang tidak dikenai pajak, tidak dikenai sewa tempat dan tempat berjualan apa adanya, tidak dilengkapi AC atau *air conditioner* seperti halnya di mal atau pasar swalayan *beken*. Soal barang boleh diadu," kata Asep Nurolin (28), lulusan STM mesin yang menjadi pedagang jeruk impor di atas kereta Tanah Abang-Rangkasbitung.

"Karena itu kalau mau mencari suasana nyaman, carilah ke mal. Tetapi, kalau mau beli barang murah, belilah di sini, di mal goyang," kata Asep mempromosikan dagangannya.

Mal goyang adalah istilah yang populer di kalangan pedagang untuk menyebut kereta kelas ekonomi. Jika pedagang kaki lima disebut mal jongkok, maka kereta kelas ekonomi yang di dalamnya menyediakan berbagai jenis dagangan disebut mal goyang.

Sebutan ini diberikan, karena berbeda dengan kereta api kelas eksekutif yang getarannya sangat halus saat berjalan, kereta kelas ekonomi bergoyang-goyang saat melaju. Ini pun masih ditambah aroma bau sedikit pesing dari toilet penumpang yang tak pernah disiram.

◆◆◆

MESKIPUN *full* goyang dan sedikit bau pesing, kereta api kelas ekonomi maupun kereta Jabotabek lainnya, menjadi sasaran pedagang. Begitu pula pengemis atau pengamen, boleh dibilang mereka itu sepertinya antre berbaris dari gerbong ke gerbong. Hal itu disebabkan kereta Jabotabek tidak pernah kekurangan penumpang, bahkan penumpang selalu padat setiap hari.

Tidak kurang dari 400.000 penumpang mengggunakan kereta Jabotabek setiap hari atau sekitar 12 juta penumpang setiap bulan. Jika dihitung dengan kapasitas bus yang mampu dipadati 60 orang, maka untuk mengangkut penumpang kereta api Jabotabek diperlukan sekitar 7.000 bus setiap hari. Berarti jumlah penumpang kereta Jabotabek, jauh lebih banyak dibandingkan kereta jurusan mana pun di Tanah Air.

Tidak heran karena banyaknya penumpang kereta api Jabotabek, kereta ini menjadi favorit di kalangan pedagang. Jumlah pedagang yang berjualan di atas kereta Jabotabek meningkat setiap hari. Pedagang yang semula berjualan di atas bus, banyak yang kemudian pindah berjualan di atas kereta api setelah mengetahui nikmatnya berjualan di atas kereta beroda besi ini. Mereka tidak perlu berlari-lari seperti ketika sedang mengejar bus, serta risiko terjatuh pun relatif kecil.

Banyak korban PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat krisis ekonomi yang kemudian menjadi pedagang di atas kereta api. Bahkan kalau dihitung-hitung, pendapatan sebagai pedagang jauh lebih besar dibandingkan gaji buruh pabrik atau pekerja proyek.

Suhendi (23), yang lulusan STM listrik di Tangerang, misalnya, semula bekerja di proyek bangunan dengan gaji Rp 450.000 sebulan. Kini setelah proyeknya terhenti, dia berjualan susu dingin di atas kereta api Jakarta Kota-Rangkasbitung.

Susu diperolehnya dari Haji Olot, seorang bandar susu di Sudimara dengan harga Rp 25 / [illegible] bungkus plastik. Setiap hari dia mengambil jatahnya 15 bungkus susu dan ditambah bonus es balok sebesar bata merah untuk pendingin.

Di atas kereta, susu itu dijualnya Rp 500 per bungkus. Jika hari sedang panas terik, dagangannya terjual habis sehingga dia bisa mengantungi keuntungan bersih Rp 37.500 per hari. Kalau hari sedang hujan atau mendung, susu dagangannya hanya laku terjual sekitar 80-100 bungkus. Masih lumayan, karena setidaknya dia bisa memperoleh pendapatan bersih Rp 20.000 sehari.

"Pendapatan ini jauh lebih besar dibandingkan ketika bekeria di proyek," kata Suhendi. Dia berbangga karena dengan berjualan di atas kereta, dia bisa menyekolahkan dua adiknya di SLTP dan STM.

◆◆◆

KERETA api Jabotabek bukan hanya menolong dan menjadi andalan para penglaju (*commuter*) dari pinggiran Jakarta. Ratusan bahkan ribuan orang, mencari makan dari kereta api ini. Bukan hanya saat terjadi krisis ekonomi, tetapi sejak puluhan tahun lalu.

Sudarno (56), misalnya, yang sehari-hari berjualan es menggunakan gerobak kayuh, sudah lebih dari 20 tahun menjadi pelanggan setia kereta api Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

Kota-Rangkasbitung. Setiap pagi, gerobak kayuhnya yang memuat 300 buah es, ikut dinaikkan ke atas kereta sejak Stasiun Duri hingga Stasiun Serpong, dengan membayar tiket Rp 1.000.

Es tersebut dibelinya dari seorang bandar di Jembatan Besi, Jakarta Utara, seharga Rp 100 per bungkus. Di atas kereta selama perjalanan menuju Serpong, es tersebut dijualnya Rp 300 per bungkus. Namun, sebagian besar es itu dijualnya di sekitar Serpong dengan harga Rp 300 per bungkus. Hampir setiap hari 300 buah es yang dijajakannya habis terjual, sehingga dia mendapat keuntungan bersih Rp 60.000 sehari.

Sebagian pendapatannya dia gunakan untuk menyekolahkan ketiga anaknya serta membeli tanah di kampung halamannya di Purwodadi, Jawa Tengah. Pengeluaran di Jakarta tidak terlalu banyak, karena untuk tidur dan sekadar minum disediakan juragan es. "Selain juragan es, yang banyak menolong saya, ya... kereta api ini. Tidak terbayang jika setiap hari harus mengayuh dari Duri ke Serpong. Untungnya ada kereta," ujarnya.

Meski banyak menolong dan menjadi gantungan hidup bagi banyak orang, nasib kereta api ekonomi Jabotabek, persis seperti lilin. Cahayanya menerangi banyak orang, tetapi dirinya perlahan-lahan habis dan sinarnya semakin redup sebelum akhirnya mati.

Nasib kereta api Jabotabek sangat mengenaskan. Akibat murahnya tarif paling mahal hanya Rp 1.000 per orang. Bahkan Rp 500 untuk Jakarta Kota-Palmerah, kereta Jabotabek mengalami kerugian dari biaya operasionalnya sekitar Rp. 9,2 milyar per tahun.

Bukan hanya murahnya tarif yang menjadi penyebab kerugian, tetapi banyaknya penumpang yang tidak mau membayar meski dengan tarif yang sangat murah sekalipun. Dari 400.000 penumpang yang diangkut setiap hari dengan 320 perjalanan KA Jabotabek, sekitar 20 persen di antaranya tidak mau membayar.

Kondisi ini diperparah lagi dengan dicurinya berbagai fasilitas kereta api mulai dari kipas angin, gantungan baju di dekat jendela, besi pegangan tangan hingga kran air. Angkutan massal yang katanya dibutuhkan masyarakat, bukannya dipelihara, malah dirusak sendiri oleh sebagian masyarakat. Klop dengan perhatian pemerintah yang juga tidak *poll* betul untuk memperhatikan transportasi massal. **(Try Harijono)**



Kompas/johnny tg

AROMA KHAS KERETA EKONOMI — *Pengapnya udara yang mengalir di dalam gerbong kereta api kelas ekonomi 914 jurusan Tanah Abang-Rangkasbitung, seolah tidak berpengaruh pada orang-orang yang mencari nafkah di atas kereta seperti penjual baju, pengamen, tukang minuman, dan binatang kelinci, yang berlalu-lalang di dalam gerbong kereta. Semua hal tersebut, ditambah dengan kondisi fisik kereta yang kerap tanpa kaca jendela dan penerangan lampu, menjadi ciri khas dari pelayanan kereta api kelas ekonomi.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 19 / 1-3
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 387.5 / PENGANGKUTAN LAUT

Proses Hukumnya Penuh Kejanggalan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menilai proses hukum terhadap kapal keruk pasir laut penuh kejanggalan. Kesalahan yang didakwakan hanya pelanggaran Undang-Undang (UU) Pelayaran, dan proses penyidangan tujuh dari 13 kapal berlangsung sangat singkat, yakni dua hari.

Itu disampaikan Rokhmin Dahuri di Jakarta, Kamis (10/10). Dia menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang terhadap tujuh kapal keruk dengan cuma membayar denda Rp 30 juta, atau kurungan penjara enam bulan kepada nakhoda dan pemilik kapal. Majelis hakim pun memutuskan ketujuh kapal yang ditahan segera dikembalikan kepada pemiliknya.

"Kami sangat menyayangkan mengapa cuma satu pelanggaran yang didakwakan saudara jaksa terhormat dan mengapa proses hukum begitu cepat. Ada apa ini? Jadi, saya ingin tegaskan bahwa ke-13 kapal keruk itu takkan dilepas, sebab dijadikan bukti dalam pelanggaran lainnya segera dilajukan ke kejaksaan," kata Rokhmin.

Kesalahan lain yang akan diajukan adalah pelanggaran UU Kepabeanan. Hal ini terkait dengan manipulasi volume ekspor pasir laut. Sebab, data yang tercatat dalam pemberitahuan ekspor milik Bea dan Cukai jauh lebih rendah dibandingkan yang tertera pada *Maritim Port Authority* Singapura.

Pelanggaran lain yakni terhadap UU Lingkungan Hidup dan KUHP yang terkait dengan pencurian. Tuntutan kumulatif ini sudah hampir rampung dan pelaku akan dituntut hukuman yang seberat-beratnya dan kapal keruk yang ada diupayakan disita untuk negara.

Gelagat kolusi

Rokhmin mengakui, sejak awal proses penyelidikan kasus kapal keruk, pihaknya telah mencium gelagat yang tidak beres dari aparat kejaksaan. Bahkan, mereka terkesan ingin mempersulit penyelesaian dan penuntasan kasus tersebut.

Misalnya, soal manipulasi volume ekspor pasir laut. Data yang ditunjukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) sudah sangat lengkap dan akurat, baik yang tercatat pada Bea dan Cukai serta *Maritim Port Authority*. Perbedaan volume dan *trip* pun sangat nyata.

Akan tetapi, anehnya, jaksa tetap menolak. Bahkan, data manipulasi yang ada dianggap tidak valid dan menuntut ditunjukkan bukti fisik.

"Makanya, saya jadi tak mengerti lagi dengan aparat kejaksaan yang menangani sus kapal pasir laut. Seolah tak ingin menegakkan wibawa hukum di negara ini," ujar Rokhmin yang mengaku tadinya aparat Bea dan Cukai pun bersikap sama. Namun setelah didesak berkali-kali, akhirnya mulai serius menangani kasus kapal keruk pasir laut.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TP4L awal pekan silam bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, disepakati dakwaan berlapis terhadap kasus ke-13 kapal keruk pasir laut. Bukan cuma UU Pelayaran seperti yang didakwakan, disidangkan dan divonis pekan ini. "Jadi, jaksa penutut umum dan majelis hakim di Tanjung Pinang yang menangani telah menyalahi kesepakatan aturan main bersama untuk penanganan kasus kapal keruk pasir laut," tutur Rokhmin.

Dia juga menegaskan, akan menyurati Jaksa Agung serta Menteri Kehakiman dan HAM sekaligus meminta dilakukan penyelidikan terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus kapal pasir laut. Karena kenyataan di lapangan memperkuat dugaan telah terjadi kolusi antara oknum penegak hukum dan pemilik atau pengelola kapal.

"Ada beberapa anggota DPR, antara lain Priyo Budi Santosa juga meminta segera diusut kejanggalan proses hukum kasus kapal pasir laut. Jadi, saya akan menyurati Jaksa Agung serta Menteri Kehakiman dan HAM agar melakukan pengusutan terhadap kinerja aparat mereka di daerah. Saya juga telah menelepon Pak Yusril, dan dia kaget setengah mati setelah mendengar vonis hakim itu," tutur Rokhmin.

Beromset Rp 20 milyar

Secara terpisah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting mengatakan, keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sangat ringan. Sebab, berdasarkan perhitungan Walhi bisnis pasir laut di Kepulauan Riau (Kepri) itu beromset Rp 20 milyar per hari. Padahal pemasukan negara berupa berbagai pungutan resmi sangat kecil yakni sebesar Rp 18,4 milyar dari pendapatan yang diperoleh mencapai 18 juta dollar AS per tahun.

"Vonis tersebut sebagai preseden buruk yang sama sekali tidak ada efek jera bagi pelakunya," kata Longgena Ginting. Meskipun dampak pengerukan pasir laut sangat buruk karena mengakibatkan air laut keruh, ekosistem laut rusak total karena pengerukan pasir laut tanpa dilengkapi Amdal (Analisa mengenai Dampak Lingkungan).

Berdasarkan pemantauan Walhi di lapangan, beberapa pulau kecil di kawasan Kepri telah hilang dan sekitar 4.000 nelayan yang biasa mencari ikan di Kepulauan Karimun mulai kehilangan mata pencarian. Selama ini setiap nelayan bisa menghasilkan ikan seberat 30-50 kilogram per hari, tetapi belakangan ini untuk mendapatkan 10 kilogram ikan saja sangat sulit. (JAN/ETA)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Jum'at / 11 / Oktober / 2002
Hlm/Kolom : 17 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 388 / LAW LINTAS

Pemprov DKI Tak Serius Tangani Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak serius mengurus dan menangani kesemrawutan lalu lintas di Ibu Kota. Penundaan realisasi proyek jalur khusus bus *(busway)* misalnya, bisa menjadi petunjuk kurangnya kemampuan manajerial Pemprov DKI dalam sistem transportasi kota.

Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tubagus Karbyanto mengatakan itu, Kamis (10/10), menanggapi gagalnya realisasi proyek *busway* senilai Rp 54 milyar dalam tahun anggaran 2002 pada tahun ini.

Proyek *busway* yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2002 semula direncanakan terealisasi bulan Agustus 2002. Namun, karena ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta—dengan alasan sedang dalam sosialisasi—dalam pengadaan 60 bus dan pembuatan halte di 23 jembatan penyeberangan orang sepanjang 12,9 km dari Blok M (Jakarta Selatan) hingga Kota (Jakarta Barat-Jakarta Pusat), proyek itu akhirnya ditunda. Penundaan ini adalah yang ketiga kalinya. Pertama sembilan tahun lalu, penundaan kedua pada bulan Agustus lalu, dan yang ketiga pada bulan Oktober ini.

Rencana tersebut kembali tidak bisa diwujudkan karena, katanya, proyek masih dalam tahap sosialisasi, dan alasan persoalan teknis, seperti standar pelayanan, tender pengadaan bus, dan persiapan operator yang belum tertangani secara baik.

Menurut Tubagus, pengadaan *busway* sebenarnya merupakan pemecahan parsial dari kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. "Aspek integral dari pemecahan kesemrawutan transportasi adalah pembenahan izin trayek dan kendaraan pribadi yang terlalu gampang dan tumpang tindih," ujar Tubagus.

Ia mengatakan, penundaan proyek sudah biasa terjadi dalam perencanaan program Pemprov DKI Jakarta. Misalnya proyek pengadaan taman di 17 daerah kumuh padat dan kumuh miskin (kupat kumis) pada tahun ini, yang terealisasi baru di lima lokasi. Hal lain, kata Tubagus, penyusunan program tidak melibatkan masyarakat.

"Di sini terlihat kurangnya kemampuan eksekutif kita dalam me-*manage* setiap program yang diajukan. Asal mengajukan program saja, tanpa disertai kajian baik dalam hal pendanaan, konsep, dan kapasitas dari eksekutif," katanya.

Keragu-raguan

Secara terpisah, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Amarullah Asbah mengatakan, penundaan berulang kali pengadaan jalur khusus bus merupakan wujud dari sikap Pemprov DKI yang mengandung keraguan dalam merencanakan sistem transportasi di Jakarta. "Penundaan sangat disayangkan karena sebenarnya kami maunya lalu lintas di Jakarta bagus. Akan tetapi, jika perencanaannya kurang baik seperti ini, bagaimana transportasi bisa diperbaiki? Bagaimana mungkin kesemrawutan lalu lintas bisa teratasi?" ujarnya.

Dalam pembahasan mengenai pengadaan *busway*, kata Amarullah, pihaknya sudah melontarkan kritik dan memberikan peringatan. "Tapi, pihak eksekutif yakin program tersebut bisa terealisasi tahun ini. Mereka mengekspos yang baik-baik saja," ujar Amarullah.

Apakah penundaan itu karena terjadi rebutan "lahan bisnis" antara eksekutif dan legislatif, Amarullah mengatakan, kalau itu terjadi, berarti tindakan tersebut tidak simpatik dan menjijikkan. (PIN)